

AGENDA REKONSILIASI IRIAN JAYA

Suatu pengalaman yang membingungkan

Para peserta diskusi -hanya lima orang saja- saling memandang; pembicaraan macet; ternyata perbedaan sudut pandangan terlalu besar, maka sulit terjembatani. Itulah suasana pertemuan yang kami alami sewaktu ingin membicarakan sejumlah pokok persoalan kemasyarakatan di Timika baru-baru ini. Kenapa? Bukan karena persoalan, konflik antara masyarakat Amungme dengan PT Freeport, tidak penting dan tidak patut dibicarakan, melainkan karena pusat perhatian mental para peserta ternyata tidak memberikan ruang gerak secukupnya untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh pada masalah yang mau diketengahkan.

Ada yang bilang: “sudahlah, kita merdeka dulu, baru hal semacam ini diatur”. Ada yang bilang: “strategi kita terhadap perusahaan ini betul perlu dibicarakan karena pada saat ini kita rasa diganggu oleh sikap perusahaan itu”. Ada yang bilang: “entah bagaimanapun juga Freeport besok juga akan ada, maka sebaiknya kita mencari jalan untuk membujuk mereka ke meja perundingan”. Ada yang bilang: “sudahlah, perusahaan mengangkat kaki saja; setelah nanti merdeka kami akan bicara lagi dan kami yang menentukan syarat-syarat pengoperasiannya”.

Dengan sengaja kami memulai refleksi ini dengan mengisahkan pengalaman sederhana tadi. Isi pengalaman semacam ini mungkin telah menjadi isi pengalaman banyak orang akhir-akhir ini. Mungkin juga menjadi pengalaman para peserta seminar sehari yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) baru ini (tgl. 1 September 1998) di Jayapura. Seminar ini bertemakan “otonomi”, namun ditengah jalan diprotes oleh sekelompok yang berpendapat bukan ‘otonomi’ yang perlu dibicarakan, namun ‘kemerdekaan saja’. Maka, peserta saling memandang, dialog terputus, teriakan slogan terdengar, mimbar bebas dibuka, peserta-peserta bingung, dan panitia penyelenggara garuk kepala sampai akhirnya panik dan kehilangan kontrol.

Sudut pandangan berbeda; keterbukaan terganggu

Dari pengalaman-pengalaman seperti dicatat di atas ini mungkin boleh disimpulkan bahwa telah tercipta suatu suasana yang ditandai perbedaan sudut pandangan yang mudah dapat berkembang menjadi suatu polarisasi (=munculnya kubu-kubu yang saling mempersalahkan). Polarisasi ini sangat tidak membantu untuk mencapai tujuan yang bagus yang terselubung di belakang keinginan memperoleh “otonomi” atau “kemerdekaan”; malahan boleh jadi bahwa polarisasi tadi menyamakan bahwa sebenarnya kedua kubu pada dasarnya **SE**tujuan dan **SE**arah.

Kenapa sampai muncul kubu-kubu? Meninjau ke belakang sejenak, dapat kami melihat bahwa sejak bulan Mei 1998 kita semua diajak untuk terbuka hati. Sekali diajak, ternyata isi hati sangat besar dan sangat mengganggu bagi banyak orang. Maka, tidak terhindarkan lagi orang termasuk masyarakat yang sederhana saja mulai melampiaskan ketidakpuasan; ketidakpuasan dengan apa saja yang telah menggangukannya selama puluhan tahun terakhir ini.

Betul suatu era baru karena terbukti bahwa selama puluhan tahun masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, hingga menjadi simpanan yang sangat dinamis dalam lubuk hatinya. Walau ungkapan berupa keluhan atau malahan kemarahan, tersirat didalamnya terdapat mutiara-mutiara yang lazimnya disebutkan “aspirasi murni” masyarakat. Pada awalnya aspirasi-aspirasi dasariah ini kurang terumus secara terinci, maka kita boleh merasa berhadapan dengan suatu ungkapan yang masih tanpa-bentuk yang jelas, walau beberapa tuntutan yang jelas dilontarkan kepada pihak-pihak yang berkuasa. Nada dasar semua ungkapan bersifat: mohon perhatian, mohon perbaikan, mohon keadilan, mohon pengakuan, mohon reformasi sejalan dengan nada protes di seluruh tanah air Republik Indonesia.

Namun setelah kejadian-kejadian awal bulan Juli 1998, lebih-lebih setelah aksi kekerasan baik di Biak (6 Juli 1998) maupun di Abepura (3 Juli 1998), nada ungkapan mulai berubah menjadi ungkapan kejenuhan dan ungkapan hasrat kuat untuk akhirnya *‘boleh atur diri’*. Pengalaman yang mengerikan ini membuat orang sadar bahwa kata ‘reformasi’ mudah menjadi kata kosong saja, sampai ‘maksud baik’ pihak yang berwajib diragukan sungguh-sungguh. Kata ‘reformasi’ diganti menjadi kata ‘merdeka’ untuk kelompok satu, atau kata ‘otonomi’ bagi kelompok lain.

Perubahan ini terungkap secara sangat jelas dan menjadi buah bibir banyak tokoh masyarakat sehingga pada lapisan luas masyarakat mulai tertanam suatu harapan akan kemungkinan bahwa akhirnya nanti *“kita boleh atur diri”*.

Menghindari suatu perpecahan yang melumpuhkan

Maka akhirnya kita berhadapan dengan suatu masyarakat luas yang menunggu sambil berharap akan ‘kebebasannya’, dan kita berhadapan dengan –secara kasar- tiga kubu yang mengangkat suaranya yang berbeda:

- [1] kelompok masyarakat yang ingin mengungkit kembali segala penderitaan selama sekian tahun yang silam ini, hingga menjadi perhatian serius pihak yang berwajib [kubu HAM],
- [2] kelompok masyarakat yang terbuka untuk memeriksa kemungkinan perwujudan suatu otonomi yang seluas-luasnya menjadi jawaban atas aspirasi-aspirasi yang sudah terungkap oleh masyarakat [kubu Otonomi], dan
- [3] kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak mau bicara lagi dan menuntut saja haknya untuk mengatur diri secara total [kubu Kemerdekaan].

Dengan adanya ketiga kubu ini, kita sudah memasuki suatu tahap baru lagi, ialah mutlak perlunya mempertemukan ketiga kelompok masyarakat ini satu sama yang lain. Kalau tidak dapat saling dipertemukan akan terdapat bahaya besar bahwa nanti masing-masing kubu berjuang sendiri-sendiri; daripada saling membantu mereka akan saling mengganggu. Akibatnya: akhirnya segala perjuangan akan macet dan akan membawa kekecewaan besar bagi masyarakat luas yang ‘sedang menunggu’. Maka suatu dialog sangat dibutuhkan. Kenapa?

Kekuatan dari suatu dialog

Keyakinan kami bahwa pengadaan suatu dialog yang terbuka akan menguntungkan segala kelompok dan akan melayani masyarakat yang luas. Dialog adalah suatu sarana penjernihan dan penguatan sekaligus. Melalui dialog masing-masing kelompok ‘dipaksa’ untuk mencari tahu dengan lebih tepat aspirasi murni masyarakat, menguraikannya lebih lanjut, mengkonkritkannya

menjadi suatu “agenda praktis” (boleh saja suatu ‘agenda politik praktis’).

“Pemaksaan” yang dimaksudkan bukan suatu ancaman, namun karena berhadapan dengan pendapat orang lain, masing-masing dengan sendirinya terdorong untuk merumuskan dan menguraikan pendapatnya sendiri, sehingga menjadi lebih jelas dan lebih kaya. Apalagi baru melalui dialog sedemikian akan menjadi jelas dimana sebenarnya ketiga ‘kubu’ ada titik temu (yang pasti!) yang sangat penting dan yang dapat mempersatukan masyarakat dalam perjuangannya.

Dialog yang kami maksudkan di atas masih kurang terdapat pada saat ini. Kalau sudah ada pertemuan-pertemuan, lazimnya kesempatan-kesempatan itu sudah diatur dari salah satu sudut pandangan, tanpa memberikan keleluasan untuk berdiskusi, berdialog betul; paling-paling terdapat acara tanya-jawab.

Dialog yang kami maksudkan juga masih kurang terjadi karena antar kubu masih kurang terdapat keterbukaan (serta kepercayaan) untuk saling mendengarkan dan memanfaatkan masukan masing-masing pihak. Mungkin juga masih kurang disadari semua pihak bahwa suatu dialog justru membantu untuk mengartikulasikan isi keinginan serta perjuangannya sehingga menjadi jauh lebih kuat dan berbobot. Oleh karena kekurangan-kekurangan tadi dialog masih kurang terjadi atau kalau ada, cenderung macet. Kemacetan dialog itu ada terungkap dalam pengalaman-pengalaman yang digambarkan pada awal refleksi ini.

Ungkapan keprihatinan berbeda-beda; dasarnya satu

Kenapa pengadaan dialog begitu penting? Terlepas dari apa yang menjadi manfaat dari proses berdialog sendiri, pokok-pokok perjuangan ketiga kubu sangat penting untuk didiskusikan menjadi lebih terinci dan konkrit.

[a] soal HAM: bukan menjadi rahasia lagi bahwa masyarakat Irian Jaya selama ini menjadi korban pelbagai tindakan atau sikap yang tidak dapat diterima karena berlawanan dengan penghargaan semestinya terhadap martabat serta nilai setiap orang. Suatu gambaran yang faktual dan nyata sangat dibutuhkan serta pemahaman mengenai pola pemberlakuan yang dialami masyarakat, hingga dihayati sebagai suatu penderitaan.

[b] soal Otonomi: apa yang dimaksudkan dengan otonomi? macam apa? dengan batas apa? Apakah, misalnya, terlingkup dalam otonomi supaya masyarakat di Irian Jaya sendiri boleh menentukan program transmigrasi? Atau sendiri boleh bersuara penuh atas izin yang mau diberikan kepada salah satu perusahaan untuk beroperasi di wilayah ini? Pokoknya, isi kata ‘otonomi’ sama sekali tidak jelas, maka belum dapat ditawarkan sebagai suatu alternatif yang tepat.

[c] soal Kemerdekaan: walaupun kata ‘kemerdekaan’ memberikan suggesti bahwa isinya cukup jelas, disini pun perlu suatu refleksi lebih lanjut dengan memerincikan bagaimana kemerdekaan ini mau diwujudkan secara konkrit? Artinya apa buat kemajemukan kependudukan yang sudah terdapat? Bagaimana pengisiannya oleh masing-masing suku yang terdapat di wilayah Irian Jaya ini? Bagaimana kemandirian secara ekonomis dibayangkan, direncanakan? Dst.

Kami yakin bahwa suatu refleksi lanjut mengenai ketiga pokok sangat dibutuhkan, bukan saja untuk menjadikannya lebih jelas, namun juga untuk menunjukkan bahwa dibawah segala topik yang kedengaran sangat berbeda mungkin (atau malahan pasti!) terdapat suatu arus bawah yang

sama. Kesamaannya boleh jadi terletak dalam tuntutan masyarakat supaya *‘diakui dalam kesejatiannya sebagai manusia dan dalam haknya untuk bersuara sebagai tuan rumah, maka berhak untuk mengatur rumah tangganya’*. Disitu letaknya titik temu ketiga kubu, dugaan kami.

Dialog digelar oleh lembaga pengantara

Bagaimana dan oleh siapa dialog yang begitu vital dapat diprakarsai? Banyak forum sudah didirikan untuk mengadakan diskusi. Kebanyakan mempunyai suatu kepentingan tersendiri atau mewakili salah satu kubu atau pihak saja, maka kurang dapat diandalkan demi suatu “dialog yang terbuka”. Mungkin satu saja dari antara pelbagai forum dapat dimanfaatkan, ialah Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya [FORERI]. Susunan pendiri forum ini sebenarnya dapat menjadi jaminan bahwa forum ini dapat berfungsi sebagai sarana dialog yang dicari, *kalau* para anggotanya bisa mencapai kesamaan visi mengenai tugas dan peranannya.

Beberapa syarat perlu terwujud kalau kita mau bahwa wadah seperti FORERI dapat berfungsi demikian:

- Perlu suatu keterbukaan dari masing-masing kelompok, berdasarkan [a] kesadaran akan kepentingan pengadaan dialog ini, [b] kepercayaan satu sama yang lain, dan [c] keyakinan bahwa masing-masing pendapat perlu dipertanyakan sehingga menjadi lebih jelas dan berisi konkrit.
- Perlu suatu kerangka/setting yang tidak mengancam, atau dengan kata lain yang bebas kerekayasaan dari pihak mana pun.
- Perlu ada masukan dari sejumlah pemikir yang bersedia untuk secara kreatif, bebas dan kritis menyumbang tenaganya demi menguraikan persoalan-persoalan yang kita hadapi; masukan sebobot itu lebih dibutuhkan daripada masukan yang bergaya ‘pengarahan’ atau yang bergaya ‘pesan sponsor’.
- Perlu suatu suasana ‘tukar-menukar pikiran’ secara luas, dan bukan suatu suasana ‘tanya jawab’, sedangkan hasil tukar pikiran ini secara berkala dirangkum oleh instansi fasilitator yang profesional yang mengembalikannya kepada para peserta dialog untuk dikelola lebih lanjut lagi.
- Perlu kesediaan untuk meluangkan waktu secukupnya sesuai dengan irama perkembangan proses dialog ini. Karena menyangkut suatu proses apalagi berhubungan dengan bahan pembahasan yang sangat penting, hasilnya tidak dapat dirampungkan dalam waktu yang singkat.
- Perlu suatu pemantapan pengorganisasian intern FORERI secara jelas supaya siap untuk mengambil peranan sebagaimana diharapkan di atas ini.

Menuju pada suatu agenda rekonsiliasi

Kami sadar bahwa banyak hal masih perlu digubris lebih lanjut, dan bahwa hasil refleksi kami diatas ini baru merupakan awal suatu pergumulan yang sangat menuntut. Walau demikian kami menyajikan hasil refleksi kami ini dengan harapan supaya membantu untuk mencari jalan keluar dari suatu suasana yang melumpuhkan, dan menuju kearah perumusan suatu Agenda Rekonsiliasi yang praktis demi kepentingan masyarakat yang luas.

Jayapura, 3 September 1998

Drs. Theo van den Broek OFM